

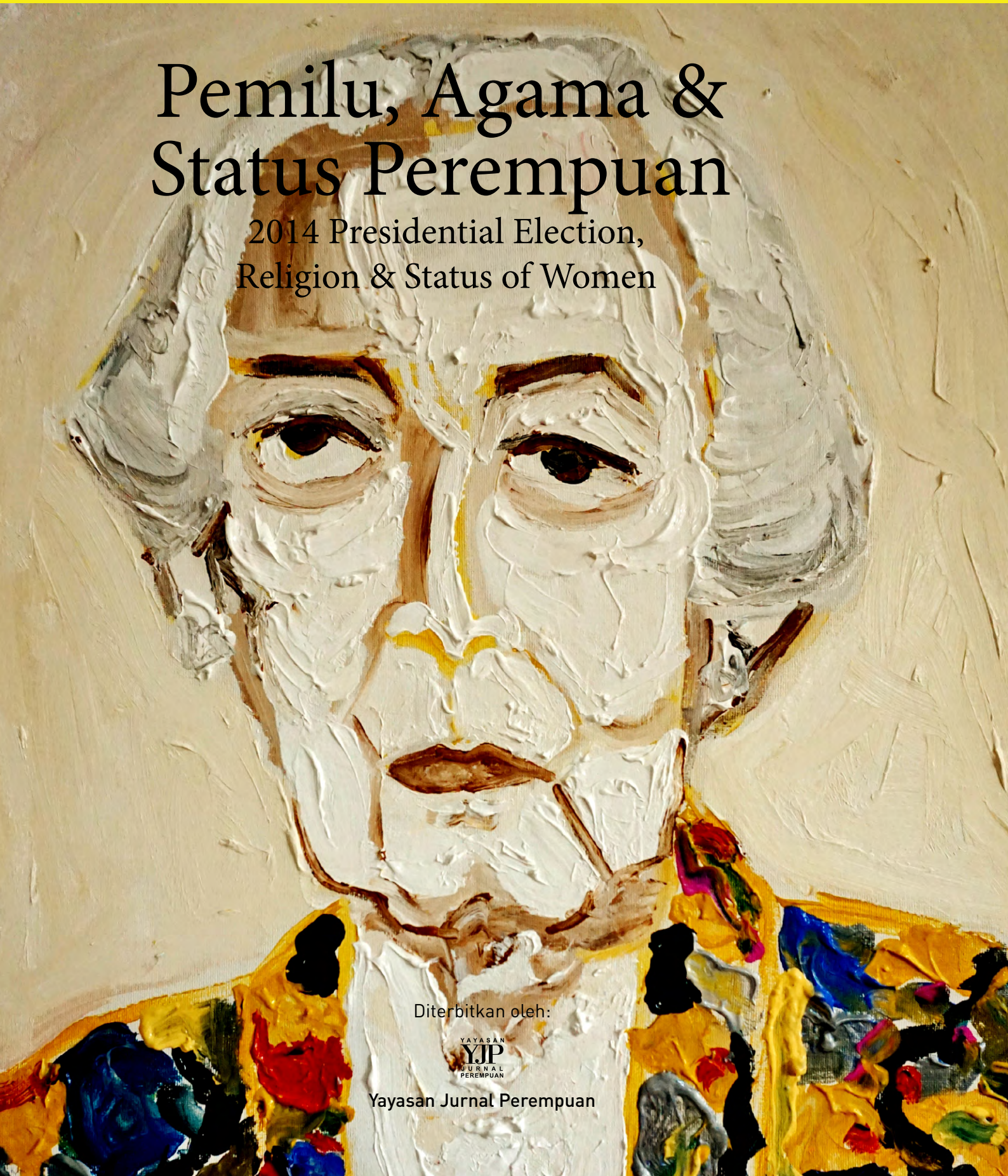
Pemilu, Agama & Status Perempuan

2014 Presidential Election,
Religion & Status of Women

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

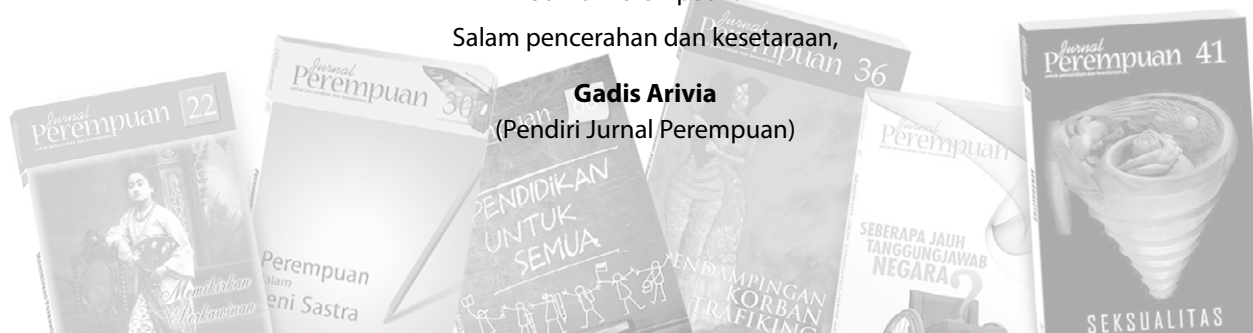
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik.....	iii-iv
Artikel / Articles	
• Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i>	175-182
<i>Rocky Gerung</i>	
• Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election...</i>	183-189
<i>Gadis Arivia</i>	
• Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i>	191-196
<i>Husein Muhammad</i>	
• Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i>	197-205
<i>Nihayatul Wafiroh</i>	
• Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i>	207-219
<i>Ira D. Mangililo</i>	
• Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i>	221-226
<i>Indraswari</i>	
• Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i>	227-232
<i>Anita Dhewy</i>	
• Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i>	233-240
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i>	241-243
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	245-246
Profil / Profile	
• Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i>	247-251
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i>	253-256
<i>Anita Dhewy</i>	

“Status Perempuan dalam Politik”

Asia adalah rumah bagi 60 persen lebih penganut agama-agama mayoritas sekarang seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Islam, dan banyak aliran kepercayaan dan keyakinan lainnya. Dan Indonesia adalah rumah dari penduduk Muslim terbesar di dunia. Asia tenggara khususnya memiliki karakter yang kuat sekali dalam perbedaan lanskap kebudayaan dengan konstelasi politik, ekonomi, demografi dan tradisi sosial yang sangat beragam. Aliran kebudayaan transversal bersinggungan dengan aliran agama seringkali mengawinkan kelompok-kelompok etno-religius. Dan dalam hal ini, modernitas menyumbang kelahiran dari fundamentalisme agama dalam politik kenegaraan. Dan korban paling nestapa dari kelahirannya adalah perempuan dan para Liyan. Lanskap baru ini mempengaruhi dan memberikan kontribusi pada bagaimana perempuan menggunakan agensinya, menggunakan ruang untuk melakukan manuver dalam arena publik yang bersifat strategis dan politis. Prediksi bahwa sekularisme akan tetap bertahan dan berkuasa dalam pertumbuhan kehidupan negara dan politik di Asia Tenggara pada dekade terakhir dipatahkan oleh semakin besarnya pengaruh agama terhadap negara melalui partai politiknya, terutama Indonesia dan Malaysia. Agama tidak hanya merangsek dalam arena publik tetapi juga masuk dalam proses-proses dan pokok-pokok peristiwa politik dan kenegaraan. Lalu bagaimana implikasinya bagi kehidupan politik dan sosial? Banyak feminis ragu dan tak percaya karena yang memenangkan dan menguasai kursi-kursi politik dan parlemen adalah tafsir-tafsir agama yang misoginis dan tak ramah pada Liyan. Fragmentasi politik dan misoginisme baru bermunculan dalam wajah politik dunia. Bahkan institusi hegemonik seperti negara dan pasar telah diubah oleh agama umat tertentu dan kemudian banyak penganut agama lain sangat dirugikan karenanya. Matra gender diabaikan dan jadi tema

semena-mena dalam pertarungan politik, baik skala internasional, nasional dan lokal.

Meskipun Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik praktek Islam moderat dan progresif, akan tetapi wajah-wajah tafsir yang tak ramah pada perempuan, minoritas seksual, etnis minoritas dan kelompok rentan lainnya masih mewarnai perjalanannya pada dekade terakhir. Tahun 1980-an merupakan tahun kebangkitan bagi revivalisme Islam di Indonesia, kemudian berkembang dengan pesat setelah jatuhnya rejim otoriter Orde Baru, Soeharto di tahun 1998. Partai-partai politik berbasis Islam (seperti PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB) berdiri dan sampai sekarang kuat menancapkan pengaruhnya dalam sistem politik dan kenegaraan di Indonesia. Dan perolehan suara di Pemilu Legislatif 9 April kemarin mereka mengalami kenaikan suara seperti yang dikabarkan dalam rubrik *RISSET Jurnal Perempuan* 82 kali ini. Dus, agama dan politik tetap tidak bisa dipisahkan dalam urusan kenegaraan. Tak hanya di pusat, sejak tahun 2001 Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu contoh ekstrem dimana perempuan kemudian banyak dikebiri hak-haknya melalui Qanun Syariah—berbeda jauh dari jaman Cut Nyak Dien dimana perempuan jauh lebih merdeka dan perkasa. Perempuan Aceh kini banyak sekali dibatasi dari cara berpakaian, berkendara, berada di ruang publik, sampai cara perempuan berswara dan tertawa pun juga diatur. Kecurigaan besar atas tafsir tak ramah gender yang masuk dalam diskursus politik ini bukan tanpa alasan.

Kerja keras perempuan dalam dua organisasi massa Islam terbesar Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk menampilkan wajah Islam yang tidak misoginis terbengkalai dan dipukul mundur oleh wajah tafsir baru yang tak lagi ramah pada para Liyan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah anggota legislatif jadi perempuan di parlemen 2014 ini, dimana perempuan hanya menempati sekitar 17% dari seluruh jumlah

kursi. Ini bukan kabar gembira. Status perempuan masihlah (l)iyah. Revivalisme Islam dalam politik, seperti dalam temuan Susan Blackburn dalam bukunya *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2004) justru menambah beban terhadap perempuan dan memperlihatkan wajah diskriminatifnya yang kentara. Setiap kali didiskusikan agama dan politik, maka aspek stabilitas dan pertahanan merupakan pokok pertama

yang dibicarakan. Sedangkan nasib perempuan dan para (l)iyah seringkali diabaikan. Tugas dari kajian Jurnal Perempuan pada edisi kali ini adalah untuk menarasikan kajian analitik untuk mempertanyakan posisi agama dalam politik dan negara secara ontologis; serta memetakan konsekuensi dan implikasinya bagi kesetaraan gender dan keadilan bagi (l)iyah dalam narasi Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini. **(Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi).**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Rocky Gerung. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014

Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 175-182, 4 daftar
pustaka.

Feminist politics is a perpetual investment in a just civilization. It awares of the injustice structure that is inherently located within the sociological body of patriarchal system. It needs more than voluntary-echo in democracy rather a strong conceptual tools that will enlighten the dialectic transport of communication in democratic system. Any feminists shall be alert to watch and guard, as well as, cynically, radically, monitor the run of the new-elected president—whether he will bring mandate of equality or not. Short-term strategy has been invested to block the new-order regime to take control; and long-term strategy shall be invested to guarantee the system of equality in the new cabinet.

Keywords: ethics of feminism, women, theocracy-patriarchy, presidential election.

Politik feminis adalah investasi peradaban. Politik feminis telah lama mengetahui bahwa menjadi perempuan dan mengalami ketidakadilan adalah satu paket sosiologi yang diselenggarakan oleh sistem patriarki. Bahwa keperluan perubahan politik tidak saja memerlukan partisipasi lapangan, tapi terlebih ketajaman diskursus dalam membaca struktur ketidakadilan itu. Itulah sebabnya diperlukan terus-menerus pemahaman teoretik yang kuat agar euforia politik lapangan itu tidak menghanyutkan peralatan-peralatan konseptual feminis, yaitu peralatan pikiran dan keyakinan tentang keadilan yang lebih radikal. Politik feminis juga memahami bahwa upaya menyelenggarakan keadilan itu, pada momen-momen kritis seperti Pemilu, memerlukan “strategi jangka pendek” untuk secara minimal mencegah masuknya watak otoritarian dalam politik.

Kata kunci: etika feminis, perempuan, teokrasi-patriarki, pemilihan presiden

Gadis Arivia. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014

Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 183-189, 16 daftar
pustaka.

This paper investigates stereotype of first ladies and image being built during 2014 Indonesia presidential election. Wives of candidates in the election are highly accomplished as well as being graduated from universities, yet these facts are not exposed adequately in the media as part of public education on equality. Most of the time, they are being posited as faithful-partner and bold-supporter of their husbands/partners. Interviews held by the media frequently narrate the drama within the house, family, and their romance. Their career and professionalism are being hidden from the public. Platform

of empowerment and gender equality are highly cultivated, promoted, and campaigned by political-parties as well as NGOs, yet missed the wives to be involved. The capacity of the presidential candidate's wives on gender, equality and women's empowerment platforms designed by the political parties need to be promoted and scrutinized.

Keywords: first ladies, wife, career, presidential election.

Tulisan ini mengkaji stereotip ibu Negara dan *image* yang terbangun pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Para istri capres dan cawapres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas serta berpengalaman, namun sayang sekali, perihal ini tidak digali media dan menjadi representasi untuk pendidikan publik. Kecerdasan mereka tidak diekspos dan tidak diberikan panggung. Mereka diposisikan sebagai pendamping setia suami dan pendukung pendapat suami mereka. Wawancara yang dilakukan media hanya seputar kegiatan rumah tangga atau drama kisah cinta mereka. Platform pemberdayaan perempuan tidak banyak berbunyi di kedua kubu karena penjelasan platform ini diambil alih oleh partai atau LSM perempuan yang telah memihak. Padahal penguasaan istri-istri capres dan cawapres dalam mendorong platform pemberdayaan perempuan yang disusun oleh tim kampanye penting untuk digali.

Kata Kunci: ibu negara, istri, karir, Pilpres.

Husein Muhammad. Komisioner Komnas Perempuan. JL.
Latuharhary No.4B, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta
10310, Telp. (021) 3903963

Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah dan Al Adalah

Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah.

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 191-196, 6 daftar
pustaka.

This paper examines theological sources of Islam on the status of women in Politics. Al Quran states that equality between men and women are guaranteed in politics such as in Quran: Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71. Islamic politics based on the following postulates: first, freedom (*al Hurriyyah*). Human beings are only serving God. Second, equality (*Musawah*, non-discriminatory). All human being are equal in front of Allah. Third, respect to other human beings (*Karamah al Insan*/ preserving the other human's dignity). Fourth, justice (*'Adalah*). Theological sources of Islam has given foundation for the contemporary status of women in politics which had long been stripped away due to misogynistic interpretation of Quran. Quran has *ontologically supply equality and justice to human rights that can be used in politics and state affairs.*

Keywords: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politics

Kajian ini membahas sumber-sumber teologi dalam Islam perihal status perempuan dalam politik. Alquran menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan politik tersebut (Q.S. Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71). Prinsip politik Islam berdasarkan beberapa postulat: *pertama*, kebebasan (*al Hurriyyah*). Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan. *Kedua*, kesetaraan (*Musawah/Equality* dan *non diskriminasi*): semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Allah. *Ketiga*, penghormatan manusia (*Karamah al Insan/Dignity*). *Keempat*, keadilan (*'Adalah/Justice*). *Sumber-sumber teologi Islam memberikan landasan fundamental bagi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan bersamanya di muka bumi ini. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tentang kesetaraan dalam politik dan kenegaraan.*

Kata kunci: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politik.

Nihayatul Wafiroh. Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta. Gajah Mada Graduate School Building, III-IV Floor, Jl. Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281. Telephone/Fax : +62-274-562570

Genealogi Politik Islam *Fatayat* di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi

Genealogy of Islamic *Fatayat* Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 197-205, 21 daftar pustaka.

Indonesian Muslim women had long been an inseparable part from political activities since the colonial period to present era. During colonial era, although they did not work formally under certain Islamic women's organizations, they made real contributions to the women's political movement in Indonesia since they formed women's branches of existing mass organizations. *Fatayat*, this organization is the sister branch of the largest Islamic organizations in Indonesia: Nahdlatul Ulama. This paper narrates that the involvement of *Fatayat* in politics had its historical and genealogical roots since Soekarno era. Sukarno facilitated *Fatayat* to develop power capacity in politics. However, during Soeharto era *Fatayat* experienced a setback due to New Order's control toward women's organization with its "ibuisism" ideology. In order to maintain its existence, *Fatayat* decided to collaborate with government by incorporating state's program such as PKK, Posyandu into their activities while also made network with national and international funding organization.

Keywords: politics, *Fatayat*, NU, Soekarno, Soeharto.

Perempuan Muslim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik sejak era kolonial sampai dengan sekarang. Selama era kolonial, organisasi perempuan Muslim merupakan cabang dari organisasi masa muslim. *Fatayat* adalah saudara bagi organisasi massa bernama Nahdlatul Ulama. Mereka memberikan kontribusi besar dalam proses pemberdayaan perempuan. Tulisan ini menarasikan keterlibatan *Fatayat* dalam politik yang secara genealogis ada sejak jaman Soekarno. Soekarno memberikan kesempatan pada *Fatayat* untuk mengembangkan kapasitas politiknya. Akan tetapi, kemudian mengalami kemunduran pada era Soeharto. Soeharto mengontrol organisasi-organisasi perempuan melalui ideology "ibuisisme" Negara. *Fatayat* kemudian memutuskan meleburkan diri dalam kebijakan pemerintah tersebut dengan terlibat dalam PKK, Posyandu, dll—meskipun juga menerima dan mengembangkan jaringan dengan dunia luar.

Kata kunci: politik, *Fatayat*, NU, Soekarno, Soeharto.

Ira D. Mangililo. Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711, Telp 0298-321212

Saudari-Saudari yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan

The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 207-219, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

The purpose of this paper is to understand the role of Indonesian Christian women in the public sphere, especially in the realm of politics. This article aims to reconstruct the role of Israelite women who lived in pre-monarchic Israel using sociological, social science, anthropological, and archeological methods. The result of my analysis shows that the demands of war that occurred continuously in the territory of ancient Israel and the opening of new land in the mountainous regions of Israel required the active participation of women to not only be involved in the reproduction but also the production—an activity that belonged to male members of the family. This phenomenon creates a balance in the division of labor between men

and women which of course increased the status of women in society. The result of this reconstruction that underlines the active role of women in the public sphere in the world of ancient Israel becomes an important model for Christian women in Indonesia today to take an active role in the public sphere, especially in politics.

Keywords: women, public sphere, politics, Christian theology.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memahami peran perempuan Kristen Indonesia di ruang publik khususnya di bidang politik. Tulisan ini hendak merekonstruksi peranan perempuan yang hidup pada jaman pra-monarki Israel. Hasil analisa saya menunjukkan bahwa tuntutan peperangan yang terjadi terus-menerus di wilayah Israel kuno dan pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah pegunungan Israel menuntut adanya peran aktif dari perempuan untuk tidak hanya terlibat di bidang reproduksi melainkan juga bidang produksi—suatu aktivitas yang biasanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Fenomena ini menciptakan keseimbangan di dalam pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja meningkatkan status perempuan di dalam masyarakatnya. Hasil rekonstruksi yang menggarisbawahi peranan aktif perempuan di ranah publik di dunia Israel kuno ini akan menjadi model yang penting bagi para perempuan Kristen di Indonesia untuk turut berperan aktif di dalam ranah publik terutama di bidang politik.

Kata kunci: perempuan, ruang publik, politik, teologi Kristen.

Indraswari. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jalan Ciumbuleuit No.94, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40141 . Telp. (022) 203 2655; (022) 204 2004, Faks. (022) 203 1110

Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan

Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 221-226, 18 daftar pustaka.

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia's decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women's bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women's rights and other minorities' and vulnerable groups' rights.

Keywords: cultural prejudice, by-laws, religion, women.

Artikel ini membahas tiga isu utama yaitu perempuan, politik identitas dan agama serta relasi di antara ketiganya. Ketiganya diikat oleh prasangka budaya atas tubuh perempuan, terutama dalam 342 perda diskriminatif. Pembahasan dibingkai dalam konteks Indonesia di era desentralisasi yang ditandai dengan antara lain penerbitan berbagai kebijakan publik yang menyangkut tubuh dan perilaku perempuan atas nama moralitas dan agama. Sisi budaya dibahas guna lebih memahami kompleksitas relasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama telah dipolitisasi untuk meminggirkan suara perempuan dan kelompok rentan lain.

Kata kunci: prasangka budaya, peraturan daerah, agama, perempuan.

Anita Dhewy. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014

Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 227-232, 7 daftar pustaka.

Female representation in parliament is decreasing in 2014, from 18 to 17 percent. This is not good news at all. It deteriorates further with no focus on women's status in each of presidential candidates. Status of women, sexual minorities, and other vulnerable groups were not becoming focus of issues in debates. Women's movement in near future and in the long run shall fight hard to tackle previous problems. This 2014 General Election has been a powerful tool as well for women to participate and to voice their concern regarding issues of equality and justice. This study unearths how women usher peaceful campaign during the parliament and presidential elections—showing their political engagement to Indonesia as democratic state.

Keywords: general election, parliament election, roles of women.

Representasi perempuan di parlemen menurun di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini, dari 18 persen di 2009 menjadi 17 persen di tahun ini. Sementara, status perempuan belum terlihat menonjol dalam konteks visi misi Capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, yaitu tidak menjadi materi dalam perdebatan. Ke depan gerakan perempuan perlu berjuang lebih panjang lagi. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjadi alat partisipasi rakyat yang strategis dan bermakna. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, produk Pemilu yaitu parlemen dan presiden-wakil presiden juga relatif bisa dikritik. Kajian ini memaparkan bagaimana perempuan berusaha keras untuk mengawal pemilu damai, demikian juga memajukan suara dan partisipasinya secara politis.

Kata kunci: Pemilu, Pileg, Pilpres, peran perempuan.

Dewi Candraningrum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah 57102

Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 233-240, 8 gambar, 6 daftar pustaka.

This research explains the interaction of religion and politics during the Legislative Election of April 9 and the Presidential Election of July 9, 2014 in considering the status of women. Feminist approaches are often suspicious or cannot believe how the alliance of these two terms (religion and politics) can truly serve the mandate for gender justice and social justice. Explanation of the General Election data affirms the vulnerable status of women and other groups, both within the structure of political parties, proportion of MP's and in the executive development paradigm of the incoming President. The entire women's movement, paradigmatically and practically, needs to work together, shoulder to shoulder, in order to analyse, criticise and nurture these narratives of justice for an equal society in the coming 2014-2019 cabinet period.

Keywords: Election, women, politics, religion, cabinet.

Kajian ini menjelaskan interaksi antara agama dan politik selama Pemilu 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014 dalam kaitannya dengan status perempuan. Pendekatan feminis masih mencurigai bagaimana aliansi antara agama dan politik sesungguhnya tak melayani mandat kesetaraan. Penjelasan dari data Pemilu 2014 mengafirmasi status rentan perempuan dan minoritas Liyan baik dalam struktur dan budaya partai politik, yaitu proporsi anggota legislative dan eksekutif. Seluruh gerakan perempuan, dalam fakta ini, perlu bergandengan tangan untuk bekerjasama untuk menulis ulang keadilan gender dalam masyarakat untuk perubahan pada periode kabinet 2014-2019.

Kata kunci: Pemilu, perempuan, politik, agama, kabinet.

Saudari-Saudari yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan

*The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on
the Roles of Women's Politics*

Ira D. Mangililo

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711, Telp 0298-321212

iralilo@yahoo.com

Naskah Diterima 8 Mei 2014. Direvisi 29 Juni 2014. Disetujui: 20 Juli 2014

Abstract:

The purpose of this paper is to understand the role of Indonesian Christian women in the public sphere, especially in the realm of politics. This article aims to reconstruct the role of Israelite women who lived in pre-monarchic Israel using sociological, social science, anthropological, and archeological methods. The result of my analysis shows that the demands of war that occurred continuously in the territory of ancient Israel and the opening of new land in the mountainous regions of Israel required the active participation of women to not only be involved in the reproduction but also the production—an activity that belonged to male members of the family. This phenomenon creates a balance in the division of labor between men and women which of course increased the status of women in society. The result of this reconstruction that underlines the active role of women in the public sphere in the world of ancient Israel becomes an important model for Christian women in Indonesia today to take an active role in the public sphere, especially in politics.

Keywords: women, public sphere, politics, Christian theology.

Abstrak:

Tujuan tulisan ini adalah untuk memahami peran perempuan Kristen Indonesia di ruang publik khususnya di bidang politik. Tulisan ini hendak merekonstruksi peranan perempuan yang hidup pada jaman pra-monarki Israel. Hasil analisa saya menunjukkan bahwa tuntutan peperangan yang terjadi terus-menerus di wilayah Israel kuno dan pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah pegunungan Israel menuntut adanya peran aktif dari perempuan untuk tidak hanya terlibat di bidang reproduksi melainkan juga bidang produksi—suatu aktivitas yang biasanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Fenomena ini menciptakan keseimbangan di dalam pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja meningkatkan status perempuan di dalam masyarakatnya. Hasil rekonstruksi yang menggarisbawahi peranan aktif perempuan di ranah publik di dunia Israel kuno ini akan menjadi model yang penting bagi para perempuan Kristen di Indonesia untuk turut berperan aktif di dalam ranah publik terutama di bidang politik.

Kata kunci: perempuan, ruang publik, politik, teologi Kristen.

Pendahuluan

“Dunia politik adalah bukan dunianya perempuan,” demikianlah ungkapan yang sering digunakan di masyarakat untuk membatasi peran serta kaum perempuan di berbagai sektor di ruang publik terutama di bidang politik. Napsiah mengatakan bahwa anggapan seperti ini dapat bertumbuh dengan suburnya akibat adanya istilah publik dan privat yang dihubungkan secara langsung dengan konsep gender, peran gender, dan stereotype yang telah berkontribusi terhadap terciptanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara laki-laki dan perempuan.¹ Marjinalisasi dan alienasi terhadap

perempuan terutama di dalam ranah politik dapat terlihat nyata di dalam minimnya jumlah perempuan yang terlibat aktif di dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, hingga pada aras institusi-institusi pemerintahan.² Hal ini dapat terlihat jelas di dalam jargon-jargon politik yang menyudutkan dan meminggirkan perempuan di Indonesia. Jargon-jargon tersebut antara lain “pemimpin harus laki-laki,” “perempuan tidak perlu berpolitik,” “tugas perempuan itu melayani laki-laki,” “perempuan

sebagai perhiasan politik,” “perempuan sebagai komoditas politik,” “perempuan sebagai objek,” “dunia politik, dunianya maskulin,” dan “perempuan itu tidak vokal.”³

Namun selain hal-hal di atas, perlu diingat pula bahwa ketidakterlibatan perempuan di dunia politik juga disebabkan oleh keengganan perempuan sendiri untuk terlibat secara aktif di dalam dunia ini yang dianggap sebagai dunia yang kotor, keras dan ganas karena lekat dengan kekerasan dan persaingan yang tidak sehat. Kenyataan seperti ini tentu saja sangat disayangkan mengingat bahwa jika perempuan ingin berperan aktif untuk mengubah stigma dan stereotipe yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai sosok lemah lembut, emosional, dan tidak rasional, maka perempuan harus secara sadar melibatkan dirinya secara aktif di dalam dunia politik. Keterlibatan ini akan menolong perempuan untuk mengartikulasikan dan menyuarakan kepentingan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan negara sehingga kebijakan-kebijakan tersebut mengedepankan kesetaraan gender. Hal ini jelas akan terwujud jika ada wakil perempuan yang proporsional di dalam parlemen. “Argumentasi ini didasarkan pada sistem pengambilan keputusan secara voting yang diterapkan di parlemen, di mana pengambilan keputusan di parlemen didasarkan pada jumlah suara yang masuk. Semakin banyak perempuan di parlemen akan semakin banyak kepentingan yang terakomodasi.”⁴

Tuntutan kuota perempuan di parlemen guna menjamin keterlibatan perempuan secara aktif di dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada kaum perempuan ini tidak sepenuhnya diterima begitu saja. Mereka yang kontra terhadap strategi kuota berpendapat bahwa keterwakilan perempuan di parlemen justru “kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan upaya pemberdayaan politik perempuan.”⁵ Di sini, kuota tidak bisa dilihat sebagai alat ukur yang menjamin representasi kepentingan perempuan di parlemen karena tidak semua perempuan yang duduk di parlemen memiliki *gender awareness* atau kepedulian terhadap isu perempuan dengan perspektif gender. Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan oleh Rahmawati bahwa “hal yang terpenting bukanlah kuota, melainkan *gender awareness* pada anggota parlemen untuk dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan perempuan, dan lebih jauh lagi membuat kebijakan yang berperspektif gender atau adil gender baik bagi laki-laki maupun perempuan.”⁶

Pembahasan tentang peranan para perempuan Indonesia di ranah politik membawa kita pada sejumlah pertanyaan tentang peran aktif para perempuan Kristen sendiri di dunia politik. Sudah sejauh mana para perempuan Kristen secara sadar melibatkan dirinya di dalam dunia ini? Bagaimana pandangan Alkitab sendiri tentang peranan perempuan di ranah publik? Apakah nilai kekristenan yang memiliki dasar dari Alkitab sebagai kitab suci mendukung atau bahkan justru menjadi salah satu penghambat utama bagi keterlibatan perempuan di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan di atas mendorong saya untuk mengkaji lebih jauh tentang peranan perempuan Kristen di dunia politik Indonesia.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memahami peran para perempuan Kristen Indonesia di ranah publik khususnya di bidang politik. Tulisan ini menunjukkan bahwa ada kurang lebih dua faktor utama yang menghambat partisipasi para perempuan Kristen, yaitu tindakan negara pada masa Orde Baru yang telah secara terencana dan sistematis menghentikan aktivitas-aktivitas politik para perempuan dan mengembalikan mereka ke ranah domestik. Hal yang kedua adalah berkenaan dengan kehadiran teks-teks di dalam kitab suci agama Kristen sendiri beserta dengan penafsiran-penafsirannya yang menghalangi keterlibatan kaum perempuan Kristen di ranah publik. Menanggapi kehadiran teks-teks seperti itulah maka metode sosiologi, sosial-sains, antropologi, dan arkeologi akan digunakan guna merekonstruksi peranan para perempuan yang hidup pada jaman pramonarki Israel kuno. Hasil analisis saya menunjukkan bahwa tuntutan peperangan yang terjadi terus-menerus di wilayah Israel kuno dan pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah pegunungan Israel menuntut adanya peran aktif dari perempuan untuk tidak hanya terlibat di bidang reproduksi melainkan juga bidang produksi-suatu aktivitas yang biasanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Fenomena ini menciptakan keseimbangan di dalam pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja meningkatkan status perempuan di dalam masyarakatnya. Hasil rekonstruksi yang menggarisbawahi peran aktif perempuan di ranah publik di dunia Israel kuno ini bisa menjadi model yang penting bagi para perempuan Kristen di Indonesia untuk turut berperan aktif di dalam ranah publik terutama di bidang politik.

Guna mencapai tujuan di atas maka tulisan ini akan diawali dengan pembahasan tentang

perempuan Kristen dan partisipasinya di ranah publik. Saya kemudian akan melanjutkan dengan pembahasan tentang kedudukan perempuan pada masa pra-monarki dan monarki Israel Kuno yang ditinjau secara sosiologi, sosial-sains, antropologi dan arkeologi. Akhirnya berdasarkan hasil analisis tentang keseimbangan pembagian kerja pada Zaman Besi I yang menyebabkan kenaikan status kaum perempuan perempuan maka tulisan ini akan ditutup dengan uraian saya tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh para perempuan Kristen Indonesia ketika akan berpartisipasi di dalam ranah politik.

Teologi Kristen, Tafsir Androsentris dan Status Perempuan

Peranan para perempuan Kristen di dalam ranah politik tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan bangsa mereka. Elizabeth Martin mengemukakan bahwa kemerdekaan Indonesia dan proses demokratisasi telah memberikan kepada perempuan Indonesia kesempatan yang penting untuk memainkan peran-peran utama sebagai warga dari negara yang demokratis. Bagi para perempuan Indonesia, kesempatan untuk mendefinisikan sendiri peran-peran mereka, kewarganegaraan, dan partisipasi di dalam sebuah negara baru muncul pada tahun 1959 ketika negara mereka yang baru saja merdeka memulai proses pembangunan bangsa pascakolonialisasi dan transisi ke demokrasi.⁷ Melalui aktifitas gerakan sosial pada jaman presiden Sukarno yang mengambil bentuk dalam berbagai organisasi keagamaan dan sekuler, perempuan-perempuan ini membuka diri mereka pada ide-ide baru yang berdaya cipta dan mereka mulai terlibat di dalam berbagai dunia publik baik yang bersifat politik maupun keagamaan.

Namun ketika Suharto, presiden Indonesia yang kedua, mulai berkuasa pada tahun 1965, ia menghancurkan GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) dan mendefinisikan ulang seluruh pengertian tentang keterlibatan perempuan di dunia politik di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara memperkenalkan propaganda Orde Baru yang menghakimi dan mencap GERWANI sebagai bagian dari gerakan komunis.⁸ Suharto juga mengonstruksikan litani kejahatan dengan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melegitimasi pembunuhan besar-besaran yang sangat brutal yang dilakukan pada tahun 1965-1966 di berbagai wilayah yang berbeda di Indonesia.⁹ Di tahun-tahun tersebut,

banyak perempuan yang dilecehkan secara seksual, diperkosa dan disiksa. Cerita-cerita penganiayaan ini tersembunyi selama puluhan tahun lamanya atas perintah Suharto dan baru saja mendapat perhatian publik dan media pada saat penggulingan kekuasaan Orde Baru.¹⁰ Aksi brutal Suharto untuk menghancurkan gerakan-gerakan perempuan yang berkembang pesat pada jaman Sukarno berakibat pada tenggelamnya kelomok-kelompok tersebut. Pada saat itu, badan perwakilan perempuan berubah menjadi organisasi "istri." Istri para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk bergabung dengan Darma Wanita dan berkewajiban untuk mendukung suami mereka. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)-organisasi tingkat desa yang merupakan wadah tempat dilaksanakannya program kesejahteraan pemerintah-telah berkomitmen untuk menjalankan lima tugas seorang perempuan yang diawali dengan peranan seorang perempuan sebagai seorang istri dan ibu.¹¹ Pemaparan di atas menunjukkan bahwa penggabungan antara ideologi militer dan patriarki telah memaksa para perempuan di Indonesia untuk kembali lagi ke ruang privat/domestik mereka-ruang yang diterima dan dinilai oleh masyarakat patriarkal sebagai wilayah dan kodrat para perempuan.

Dampak domestikasi ruang gerak perempuan memiliki akibat yang tidak bisa dipandang sebelah mata bagi para perempuan Kristen Indonesia. Sikap mereka terhadap ruang publik khususnya ruang politik yang semula sudah diwarnai oleh perasaan bahwa politik itu "kotor, diwarnai oleh pemutar-balikan kebenaran, sebuah permainan orang atau kelompok tertentu untuk kepentingan mereka sendiri,"¹² semakin diperkuat oleh kenyataan ini. Di samping itu, seperti yang dikatakan oleh Kolimon bahwa, "Terutama oleh trauma kekerasan politik anti-komunisme pada tahun 1965, terdapat semacam kegamangan kolektif di kalangan rakyat Indonesia terhadap aktifitas politik. Hegemoni politik Orde Baru semakin memperlemah kapasitas politik rakyat tersebut."¹³

Kenyataan di atas ditambah pula dengan kehadiran sejumlah teks yang terdapat di dalam Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen yang isinya secara eksplisit maupun implisit membenarkan dan mendukung subordinasi terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena telah sekian lama kaum laki-laki di dalam gereja menggunakan terjemahan-terjemahan, bacaan-bacaan dan penafsiran-penafsiran dari kitab suci untuk mendukung, mengabadikan dan memvalidasikan penyingkiran perempuan untuk

secara aktif berperan di dalam berbagai bentuk kepemimpinan baik di dalam gereja maupun di berbagai organisasi di luar gereja. Contoh bacaan-bacaan tersebut adalah cerita Adam dan Hawa yang mengungkapkan kejatuhan manusia di dalam dosa yang ditafsirkan sebagai akibat dari dosa/pelanggaran perempuan pertama yaitu Hawa (Kejadian 3); nasihat Rasul Paulus kepada para perempuan di Efesus untuk tunduk kepada suami-suami mereka yang dianggap sebagai wakil Kristus di bumi (Efesus 5:22-24); larangan Rasul Paulus kepada perempuan untuk mengajar, memberi perintah maupun membuka mulut di dalam jemaat (1 Timotius 2:11-12).

Akibat nyata dari cara berpikir yang mendasarkan teks-teks Alkitab sebagai landasan berpijak untuk menentukan peran perempuan di ranah publik, terutama yang berhubungan dengan kepemimpinan, dapat kita lihat di dalam konteks yang paling dekat dengan para perempuan itu sendiri, yaitu di dalam gereja. Para perempuan terutama yang tinggal di wilayah-wilayah seperti Sulawesi Selatan bersaksi bahwa, sebelum masuknya Injil, mereka telah terlibat secara aktif di dalam kepemimpinan pemerintahan dan memiliki posisi strategis di dalam birokrasi karena kepemimpinan perempuan tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat tabu di dalam komunitas tradisional Sulawesi. Judith Na Bik Gwat mengatakan bahwa, hingga tahun 1970-an, banyak ritual yang dipimpin oleh para perempuan. Di samping itu, bukti bahwa kepemimpinan perempuan diterima secara terbuka di dalam tradisi Toraja dapat dilihat di dalam fakta bahwa banyak perempuan Toraja yang merupakan pemimpin perang melawan kolonial Belanda.¹⁴ Status perempuan yang tinggi ini kemudian berubah ketika Kekristenan menyebar di Toraja yang ditandai dengan didirikannya gereja di Toraja. Pada waktu itu, pendeta-pendeta Belanda mengumumkan aturan-aturan gereja di Belanda yang tidak mengizinkan perempuan untuk menjadi pendeta; konsekuensinya, sejak tahun 1947 perempuan tidak diizinkan untuk memimpin sebagai pendeta di gereja-gereja Toraja. Seperti yang dikatakan Gwat bahwa hingga hari ini masih ada sejumlah tetua di gereja yang menolak kehadiran perempuan sebagai pendeta. Mereka merasa jengah ketika menerima tumpangan tangan/berkat dari seorang perempuan.¹⁵ Hal yang serupapun dikaji secara mendalam oleh Maria Josephine Mantik di dalam bukunya *Mengapa Perempuan Dipersulit Menjadi Pemimpin? Saat Perempuan Menjawab Panggilan dan Perutusan Tuhan*.

Di dalam tulisan ini Mantik meneliti kepemimpinan pendeta perempuan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB). Ia mengatakan bahwa memang jumlah pendeta perempuan di GPIB meningkat secara angka namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masalah bias gender masih terjadi di GPIB. Perempuan pendeta mengalami berbagai tantangan dan rintangan untuk menempati jabatan tertinggi di tingkat Musyawarah Pelayanan (Mupel) dan Sinodal GPIB karena mereka dimarginalisasikan dan disubordinasi dalam bias gender. Oleh karena alasan inilah maka banyak perempuan pendeta menolak untuk berkompetisi dengan laki-laki pendeta untuk menduduki jabatan tertinggi di tingkat Mupel dan Sinodal. Selain faktor dari luar, ada juga faktor dari dalam diri para perempuan pendeta sendiri yang menyebabkan mereka enggan menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan oleh karena masih banyak pula perempuan yang berpikiran dalam kerangka stereotipe (domestik) dalam bias gender. Akibatnya mereka berpikir bahwa tugas mereka sebagai pendeta tidak pernah lepas dari kapasitas mereka sebagai ibu dan istri dan pemikiran ini tentu saja memberatkan langkah mereka untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di tingkat Mupel dan Sinodal GPIB.¹⁶

Terhadap bacaan-bacaan teks-teks Alkitab yang bersifat androsentris karena ditulis dari sudut pandang laki-laki sehingga kaya dengan muatan ideologi patriarkal yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan kaum laki-laki di berbagai ranah kehidupan, maka penting bagi para perempuan Kristen untuk memeriksa, mendekonstruksi, dan merekonstruksi asumsi-asumsi, bias-bias, dan pandangan-pandangan yang bersifat androsentris di dalam literatur Alkitab dan berbagai sejarah penafsiran. Untuk itu, sejumlah perempuan ahli kitab suci menggunakan berbagai alat, prosedur dan metodologi yang digunakan di dalam studi biblikal. Lebih dari itu, feminis menempatkan perempuan, gender, dan seksualitas sebagai pusat dari aktivitas penafsiran mereka. Di awal abad ke-21, para ahli tersebut menghubungkan analisis gender dengan berbagai kategori sosial lainnya seperti ras, kelas, dan lokasi geopolitik.¹⁷ Ada berbagai cara membaca dengan mata baru yang dihasilkan oleh para feminis Alkitab ini. Di dalam pembahasan berikut saya akan mendiskusikan hasil dekonstruksi dan rekonstruksi atas peranan perempuan pada masa sebelum munculnya kerajaan Israel bersatu di dunia Israel kuno. Tujuannya adalah guna merekonstruksi

ulang peran para perempuan pada masa itu, yang tidak melulu terpuruk dan berada di posisi inferior seperti kesan yang kita peroleh di dalam berbagai teks Alkitab.

Bagaimana Status Perempuan dalam Politik?

Ketika kita hanya menggunakan teks-teks Alkitab sebagai sumber untuk melihat peranan perempuan di dunia Israel kuno, maka kita akan menemui jalan buntu mengingat teks-teks tersebut memiliki semangat patriarkal yang kental, sehingga pada akhirnya perempuan hanya dilihat sebagai alat untuk melegitimasi peranan laki-laki di dunia Israel kuno. Memang ada beberapa teks yang menggambarkan peranan perempuan yang hidup di lingkungan kerajaan sehingga dekat dengan kekuasaan, seperti Isabel, Atalya, dan Ester, namun tidak bisa dipungkiri bahwa teks-teks itu ditulis dari kacamata para pemenang, dalam hal ini kaum laki-laki, sehingga tentu saja harus dibaca secara kritis jika kita ingin “menemukan” kembali peran dan posisi perempuan yang telah ditunggangi oleh berbagai kepentingan para pemenang tersebut.

Upaya untuk merekonstruksi peran-peran gender di dalam masyarakat Israel telah dilakukan oleh sejumlah ahli Alkitab feminis, seperti Carol Meyers dengan menggunakan pendekatan-pendekatan antropologi, sosiologi, arkeologi dan sosial-sains. Ada dua alasan utama bagi para ahli ini menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. Pertama, penggunaan dari pendekatan-pendekatan sosial-sains sangat penting mengingat adanya upaya untuk merekonstruksi pandangan yang lebih berimbang tentang status para perempuan yang selama ini sangat didominasi oleh sudut pandang dan lingkup berpikir yang bersifat patriarkal. Di sinilah kenyataan bahwa kita berhadapan dengan teks-teks kitab suci yang sangat patriarkal menuntut para ahli Alkitab untuk berdialog dengan berbagai disiplin ilmu yang dapat memberikan informasi yang tidak ditemukan di dalam laporan kitab suci.¹⁸ Kedua, Meyers berpendapat bahwa alasan penggunaan materi-materi dari bidang disiplin ilmu yang lain didorong bukan saja oleh isi sifat Alkitab sendiri yang sangat patriarkal, melainkan juga oleh ketidakseimbangan gambaran yang Alkitab berikan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Laporan Alkitab tidak saja bersifat androsentris melainkan juga tidak bersifat adil di dalam penggambaran relasi-relasi gender.¹⁹

Di dalam pembahasannya tentang kehidupan masyarakat Israel kuno pada masa pra-monarki,

yaitu pada Zaman Besi I, Meyers mengungkapkan keadaan masyarakat yang diatur dalam bentuk suku-suku. Kekuasaan pada saat itu tidak diatur dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas. Unit utama pada saat itu adalah keluarga/rumah tangga (baca: bukan suku) yang berfungsi sebagai pusat ekspresi budaya, sosial, politik dan ekonomi dari kehidupan manusia. Meyers mengungkapkan bahwa di dalam bangun kehidupan rumah tangga ada tiga aktivitas yang dimainkan oleh setiap laki-laki dan perempuan: 1) prokreasi (reproduksi), 2) produksi (*subsistence*), dan 3) proteksi (pertahanan). Asimetri dari peran-peran gender muncul akibat jumlah energi yang tidak proposional yang dikeluarkan oleh laki-laki dan perempuan di dalam ketiga aktivitas ini.²⁰ Aktivitas yang pertama adalah kegiatan yang berdasarkan biologis dan merupakan tanggung jawab perempuan, sementara aktivitas yang ketiga merupakan kegiatan yang dilakukan hampir secara eksklusif oleh laki-laki. Tuntutan untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak telah menyita hampir seluruh energi perempuan. Hal ini menyebabkan seluruh konsentrasi perempuan terpusat di ranah domestik. Kenyataan ini merupakan salah satu faktor yang menghambat kaum perempuan untuk terlibat di dalam aktivitas yang kedua, yaitu tugas *subsistence* yang diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam yang hasilnya digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Di sisi lain, akibat jarangya tuntutan untuk terlibat di dalam peperangan, maka tenaga laki-laki biasanya mengalami surplus. Akibatnya, kategori *subsistence* atau produksi biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Hal ini berarti bahwa laki-laki melakukan dua aktivitas, yaitu di dalam bidang pertahanan dan produksi yang berakibat pada tingginya status mereka dibandingkan dengan perempuan yang hanya melakukan satu aktivitas.²¹

Namun di dalam konteks Israel kuno pada Zaman Besi I, Meyers mengemukakan adanya indikasi yang merujuk pada perubahan lingkungan dan keadaan demografik yang menyebabkan pergeseran dalam keseimbangan laki-laki-perempuan seperti yang terekam di dalam hasil penggalian arkeologi dan survei. Di dalam pemaparannya, Meyers mengemukakan bahwa di masa tersebut pembagian tugas kerja di antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh partisipasi laki-laki dalam dunia militer. Palestina di akhir abad Perunggu atau di awal pembentukan kerajaan Israel dilanda oleh peperangan yang terjadi terus-menerus. Surat-surat Amarna mencatat tentang periode yang diwarnai

oleh permusuhan, sementara bukti arkeologi menunjukkan adanya penghancuran benteng pertahanan dan kota-kota. Kitab Hakim-Hakim mencatat dinamika peperangan yang berlangsung terus-menerus pada masa pendudukan Israel di wilayah pegunungan dan yang akan bertahan terus pada generasi-generasi selanjutnya ketika bangsa Filistin menjadi ancaman.²² Guna menghadapi kondisi peperangan melawan musuh mereka, yaitu pemerintahan Kanaan di dataran rendah yang menggunakan kelompok prajurit yang diperlengkapi dengan kereta perang dan senjata panah, maka bangsa Israel yang tidak dilengkapi dengan prajurit-prajurit profesional terpaksa harus menyediakan sejumlah prajurit yang dapat dipanggil sewaktu-waktu. Taktik pertahanan di dalam suku-suku Israel ini menyebabkan terjadinya rekrutmen secara acak beberapa laki-laki dari keterlibatan mereka di dalam aktivitas *subsistence* yang berlangsung di keluarga mereka masing-masing. Di masa-masa itulah para perempuan akan tampil guna menggantikan tugas para laki-laki tersebut, dan akibatnya menaikkan status mereka di mata masyarakat.²³

Selain kemungkinan adanya permasalahan militer di atas, keadaan Israel sendiri sebagai bangsa yang baru saja membuka wilayah baru di wilayah pegunungan Israel mengharuskan setiap anggota masyarakatnya untuk bekerjasama membuka wilayah-wilayah hunian baru. Kegiatan tersebut membutuhkan tenaga manusia yang luar biasa sekaligus kreativitas untuk menaklukkan alam yang keras. Tanah kering di wilayah pinggiran harus dibuat produktif dengan menggunakan tenaga kerja yang intensif dalam skala yang besar; belantara hutan harus dibersihkan (Yoshua 17:18) karena ruang terbuka di dataran pesisir dan pegunungan Yizreel tidak tersedia untuk digunakan. Waduk harus digali untuk penyimpanan air hujan karena sumber air tidak dapat diakses dengan mudah oleh bangsa yang baru terbentuk ini; sistem terasering yang cocok untuk konteks lahan kering harus dibangun di lereng bukit untuk memudahkan pertanian. Jenis-jenis pekerjaan yang berat ini termasuk di dalam tanggung jawab laki-laki. Ketika para laki-laki berkonsentrasi melakukan kegiatan-kegiatan ini, maka tugas bercocok tanam diserahkan kepada para perempuan dan hal ini turut pula menaikkan peran mereka di dalam masyarakat.²⁴

Secara keseluruhan ada tiga jenis tanaman yang biasanya ditanam di wilayah Canaan yaitu gandum, anggur, dan zaitun. Namun jenis tanaman

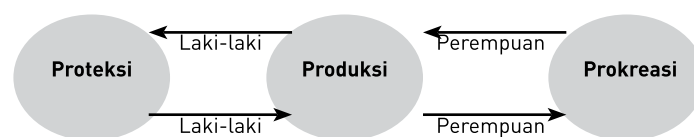
gandum hanya cocok ditanam di wilayah dataran rendah yang subur yang telah dikuasai oleh bangsa Canaan, orang-orang Filistin atau bangsa Aram. Tanaman-tanaman yang cocok dipelihara di wilayah pegunungan yang begitu berat dan tidak subur yang diduduki oleh orang Israel, adalah tanaman anggur dan tanaman hortikultura seperti zaitun. Meskipun pohon-pohon buah-buahan lainnya juga dapat tumbuh namun pentingnya tanaman zaitun sebagai sumber minyak menyebabkan dominasi tumbuhan ini.²⁵ Meskipun demikian usaha untuk menanam gandum sebagai bahan pokok untuk membuat roti, makanan pokok bangsa Israel, tetap diusahakan dengan keras di wilayah pegunungan Israel. Hal ini dapat dilihat melalui hasil penemuan arkeologi di beberapa tempat di wilayah Benyamin yang menunjukkan adanya sistem terasering yang berasal dari Zaman Besi I yang dibuat untuk menanam gandum. Hanya dengan cara inilah maka bangsa Israel dapat memproduksi bahan makanan mereka sendiri dan mendukung kehidupan perekonomian yang mandiri. Guna mendukung kehidupan bercocok tanam yang keras ini maka ketika kaum laki-laki berkonsentrasi pada pengolahan tanah agar siap ditanami maka para perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki bahu-membahu bekerja sama melakukan tugas musiman seperti menanam gandum dan melakukan panen. Mereka juga bekerja sama memelihara ladang dan kebun anggur serta pemerah susu dari hewan peliharaan mereka.²⁶

Lebih lanjut, para perempuan juga bertanggung jawab untuk menghasilkan kebutuhan pakaian, mempersiapkan makanan dan mengawetkan makanan. Perlu ditekankan di sini bahwa tugas-tugas di atas bukanlah merupakan tugas yang hanya dilakukan di dalam rumah saja. Banyak dari proses yang kompleks untuk mengubah bahan-bahan baku dari ladang pertanian dan kebun-kebun anggur menjadi bentuk yang dapat dimakan dilakukan di halaman atau di atap unit hunian atau bahkan agak jauh dari kompleks perumahan. Di samping itu, semua aktivitas tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya, tanaman sereal yang merupakan sumber makanan pokok bagi bangsa Israel membutuhkan serangkaian operasi kompleks untuk membuatnya menjadi bahan yang dapat dimakan. Butir-butir gandum harus direndam, digiling, dan dihaluskan menjadi tepung; tepung kemudian dicampur menjadi adonan kemudian dipanggang menjadi roti. Pengolahan biji-bijian gandum saja membutuhkan paling kurang dua jam atau lebih

perhari. Hal ini belum termasuk pencaharian bahan bakar dan pengontrolan api pada saat pemanggangan roti. Penggunaan waktu yang serupa juga berlaku pada prosedur untuk mengolah bahan makanan lainnya seperti zaitun, herbal, buah, dan susu agar dapat bertahan melampaui masa panen. Perempuan juga terlibat di dalam aktivitas di ladang pada musim panen dan juga terlibat di dalam berbagai operasi lainnya. Dengan berbagai variasi musim yang ada dapatlah dikatakan bahwa seorang perempuan biasanya menghabiskan 10 jam atau lebih waktunya untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dalam rumah, di luar rumah dan di halaman rumah. Dengan demikian jelaslah bahwa perempuan mempunyai beban kerja yang sangat luar biasa.²⁷ Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa semua kegiatan di atas membutuhkan ketrampilan di dalam menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Setiap perempuan dewasa di Israel kuno perlu mempelajari berbagai ketrampilan agar dapat mengubah bahan baku menjadi siap dikonsumsi. Demikian pula seorang perempuan perlu mempelajari cara pembuatan bahan pakaian mulai dari membuat benang hingga menjahit pakaian. Seorang perempuan Israel pun kemungkinan besar terlibat di dalam pembuatan keranjang dan keramik yang melibatkan penggunaan bahan kimia. Dari pemaparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa keahlian seorang perempuan Israel kuno mencakup bidang perencanaan, ketrampilan dan pengetahuan teknologi yang memang sangat berguna dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.²⁸ Hingga di sini tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan tugas kaum laki-laki yang banyak menuntut penggunaan fisik di ladang, maka tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang perempuan lebih membutuhkan tingkat keahlian, penilaian dan ketrampilan. Namun hal ini bukan berarti bahwa pekerjaan kaum laki-laki tidak membutuhkan penilaian dan ketrampilan; hanya saja secara keseluruhan pengetahuan teknologi kurang menjadi karakteristik utama dari pekerjaan laki-laki.²⁹

Melihat tingginya tuntutan pelaksanaan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perempuan demi kelangsungan kehidupan keluarga maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan hampir menjadi seimbang, yaitu 40-60. Tugas ganda yang dilakukan oleh para perempuan dalam bidang reproduksi dan *subsistence* dapat dianggap seimbang dengan tugas kaum laki-laki untuk membuka wilayah pertanian baru dan mempertahankan keamanan komunitas

secara menyeluruh.³⁰ Hal ini dapat dilihat di dalam bagan berikut:



Gambar 1. Pembagian Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

(Diadopsi dari: Sanday, 1974)

Contoh teks Alkitab yang menggambarkan tentang nilai perempuan yang hampir seimbang dengan laki-laki yang diukur dari pembagian tugas dan tanggung jawab sosial dapat dilihat di dalam Imamat 27, yang mendaftarkan tentang nilai uang (*shekel*/uang perak) yang harus dibayar oleh setiap orang ketika mengajukan nazar/permohonan kepada Tuhan. Di sini, Imamat 27 berbicara tentang aturan penggantian persembahan/hadiah dalam bentuk orang, property, hewan-hewan, dan lain-lain – yang dinazarkan kepada Tuhan. Konsep dari pemberian nazar ini sendiri sudah sangat tua seperti yang terlihat di dalam pemberian Samuel oleh Hana sebagai pemenuhan nazar (I Samuel 1:11) dan status Simson yang dinazarkan (Bilangan 6:2; Hakim-hakim 13). Namun jika dalam situasi tertentu ketika seseorang yang telah menaikkan nazarnya tidak sanggup untuk memenuhi janjinya kepada Tuhan maka Imamat 27 telah mengatur tentang mekanisme di mana barang atau orang yang dinazarkan dapat dibebaskan dari sumpah tersebut. Di sini hal yang telah dinazarkan dapat diganti di dalam bentuk uang shekel. Perlu diingat bahwa teks yang ada di dalam Imamat ini tidak mewakili daftar lengkap atau konsisten dari hadiah nazar yang dikonversi ke dalam bentuk uang; namun keberadaan daftar ini menunjukkan bahwa praktek penggantian nazar dalam bentuk uang merupakan bagian dari tradisi kuno.³¹ Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan informasi tentang jumlah uang yang harus dibayar untuk menggantikan nazar yang telah dinaikkan oleh seseorang. Jumlah uang ini menunjukkan nilai orang yang dinazarkan disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin seperti yang tercantum di dalam Imamat 27. Penilaian tentang nilai/harga dari seseorang ini kemungkinan didasarkan pada besarnya tenaga kerja yang dapat “dijual” oleh seseorang di dalam transaksi ekonomi resmi.

Tabel 1. Nilai/Harga Seseorang Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Laki/ shekel	Perempuan/ shekel	Nilai Gabungan	Persentase Perempuan
0-5	5	3	8	38%
5-20	20	10	30	33%
20-60	50	30	80	38%
60-	15	10	25	40%

(Tabel: Meyers, 1983)

Karena variable penting dalam skala ini adalah usia dan jenis kelamin, maka penilaian dapat dipahami sebagai refleksi dari kontribusi yang sebenarnya dan atau yang bersifat potensial dari laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai usia untuk tugas-tugas sosial. Di sini jelas bahwa anak-anak yang berusia di bawah lima tahun hanya dapat berkontribusi sangat sedikit di dalam melakukan pekerjaan yang sebenarnya di dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan oleh karena itu nilai absolut mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan ditetapkan sangat rendah. Di samping itu, sebagai sumber potensial bagi produktivitas, tingkat kematian yang tinggi dari anak-anak sampai usia lima tahun (sekitar 35 %) menyebabkan tetap rendahnya nilai mereka. Nilai absolut bagi kedua jenis kelamin akan meningkat secara pesat ketika usia populasi orang dewasa berada di atas usia dua puluh tahun.³²

Lebih lanjut, di dalam Imamat 27—yang diduga para ahli berasal dari masa sebelum monarki, terlihat bahwa sehubungan dengan penilaian relatif dalam tiga dari empat kelompok usia terwakili dalam tabel ini, persentase perempuan dari nilai gabungan laki-laki dan perempuan pada usia tertentu berada di atau mendekati level 40%. Semakin tinggi nilai yang dibayar oleh seseorang dalam hal ini perempuan, menunjukkan semakin besar peranan yang dimainkannya di dalam tugas sosial. Hal ini kembali menunjukkan seimbangannya peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat Israel pada Zaman Besi I. Meskipun hal ini tidak menunjukkan keseimbangan bagi perempuan di dalam hal kepemilikan harta ataupun pengesahan akan peran perempuan sebagai pemimpin namun tidak dapat dipungkiri bahwa skala ini menunjukkan adanya suatu kondisi yang memungkinkan terciptanya ketergantungan yang bersifat mutual di antara laki-laki dan perempuan. Di sini kaum laki-laki diberi kesempatan untuk mengakui kekuasaan perempuan

baik di ranah domestik dan di luar rumah.³³ Satu-satunya pengecualian pada pola ini adalah pada kelompok usia 5-20 tahun di mana nilai yang diberikan untuk menebus laki-laki adalah dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dalam nilai absolut, kategori secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia berikutnya. Salah satu faktor penyebab fenomena ini adalah berhubungan dengan tingkat kematian yang masih sangat tinggi pada kelompok pra-dewasa di mana kira-kira setengah dari populasi tidak akan hidup lebih dari usia 20 tahun. Ancaman tingkat kematian pada diri perempuan tentu saja sangat besar mengingat bahwa usia 5-20 tahun merupakan masa subur bagi seorang perempuan. Faktor ini tentu saja menyebabkan lebih rendahnya persentase penilaian perempuan.³⁴

Contoh lain yang terdapat di dalam Alkitab yang menunjukkan keseimbangan pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang berakibat pada tingginya status perempuan di dalam masyarakat dapat dilihat pada cerita kepemimpinan Debora dan Miriam. Debora adalah seorang nabiah dan seorang hakim atas Israel. Ia biasanya duduk di bawah pohon kurma Debora antara Rama dan Betel guna menyelesaikan perkara yang dibawa oleh orang Israel dari berbagai suku. Mereka datang kepadanya untuk meminta nasihat dan pertimbangan. Karena kebijaksanaannya maka Debora disebut sebagai ibu Israel. Ia juga adalah seorang perempuan yang maju bersama-sama dengan Barak ke medan perang guna memimpin umat Israel untuk berperang melawan Sisera. Nyanyian kemenangan atas musuh yang dikalahkan oleh Debora tercatat di dalam Hakim-hakim 5 dan sering disebut Nyanyian Debora. Sementara itu, Miriam adalah kakak dari Harun dan Musa (Bilangan 26:59). Ia menerima gelar “nabiah” tatkala ia memimpin perempuan-perempuan Israel memainkan alat-alat musik, menari dan menyanyikan nyanyian kemenangan untuk memeriahkan penyeberangan Laut Merah (Keluaran 15:21). Peran kepemimpinan Debora dan Miriam yang begitu dominan di dalam konteks masyarakatnya menunjukkan bahwa status seorang perempuan biasanya diukur dari tingkat kekuasaan yang dimilikinya baik di dalam ranah domestik dan/ atau di ranah publik.³⁵

Gambaran tentang besarnya peranan para perempuan di dunia Israel kuno pada masa pra-monarki yang diukur dari keterlibatan mereka di ranah domestik dan publik yang hampir seimbang

dengan kaum laki-laki menunjukkan bahwa Alkitab sendiri telah memberikan bukti tentang status positif yang dimiliki oleh kaum perempuan; bahwa tidak ada halangan bagi perempuan untuk berperan aktif di dalam melaksanakan tugas/tanggung jawab di ranah domestik dan publik. Seperti telah ditunjukkan di atas, peranan atau tenaga perempuan justru sangat diperlukan demi menopang dan memperlancar kehidupan bermasyarakat. Memang gambaran tentang peranan perempuan ini akan mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika terbentuknya monarki Israel. Sistem pemerintahan kerajaan yang bersifat hirarki menyebabkan masyarakat harus bergantung pada struktur kekuasaan baru di mana birokrasi militer, negara, dan keagamaan menguasai perekonomian masyarakat. Kekuasaan keluarga sebagai unit utama di dalam masyarakat digantikan oleh kekuasaan raja. Kesetiaan yang dimiliki di antara suku-suku atau klan-klan yang berbeda kini dialihkan pada kesetiaan kepada raja dan sistem politiknya. Sistem politik yang baru ini menghancurkan sistem pembagian tugas yang telah tercipta di dalam masyarakat. Peranan perempuan, terutama yang berada di kota, menyusut dengan drastis karena mereka tidak lagi terlibat di dalam tindakan produksi; suami-suami mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang membawa penghasilan/upah yang berguna bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Akibatnya peranan perempuan kini dibatasi hanya pada tugas reproduksi. Peranan para perempuan di desa di lain pihak tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mereka masih tetap terlibat di dalam kegiatan produksi dan pertanian meskipun kegiatan-kegiatan tersebut secara perlahan mulai dikontrol oleh kerajaan ketika terjadi perubahan ekonomi yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak untuk menunjang kehidupan para elit dan ongkos peperangan mereka. Akibatnya rakyat kecil, terutama yang berada di pedesaan, harus terlibat hutang yang menjerumuskan mereka pada penderitaan dan kemiskinan. Keluarga-keluarga Israel menjadi tidak lagi produktif sehingga berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan mereka.³⁶ Contoh dari bagian Alkitab yang mengilustrasikan keadaan ini adalah Yesaya 5:1-7 yang menyajikan sebuah puisi yang menurut Margaret Miller diucapkan dari perspektif perempuan dalam konteks pergolakan sosial yang melanda pedesaan Yehuda pada abad kedelapan pada masa pemerintahan kerajaan Israel Selatan. Pada konteks tersebut, pergeseran pengambilan

keputusan dari lokal ke monarki berdampak besar pada para perempuan yang bertanggung jawab atas banyak aspek kehidupan seperti mengusahakan dan mengolah bahan baku makanan untuk dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga. Untuk itu, Yesaya 5:1-7 menggambarkan tentang retorika yang digunakan oleh para perempuan Yehuda untuk mengkritisi dan mengatasi ketidakadilan yang telah memporak-porandakan dunia mereka.³⁷

Saudari-Saudari yang Hilang

Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kita tidak dapat memungkiri bahwa salah satu faktor yang menghambat partisipasi para perempuan Kristen untuk aktif terlibat di ranah publik adalah berkenaan dengan hasil pembacaan atau penafsiran kitab sucinya yang bersifat androsentrik, yang secara langsung atau tidak langsung telah membuat para perempuan kehilangan kepercayaan diri untuk terlibat aktif di dunia di luar rumah tangganya sendiri. Banyak perempuan yang merasa tidak layak untuk terlibat di dalam dunia politik karena Alkitab sendiri menggambarkan mereka sebagai warga negara kelas dua yang peranannya tidak boleh melebihi kaum laki-laki. Di dalam gereja sendiri kita melihat bahwa jarang sekali ada perempuan yang diberi kesempatan untuk menjabat sebagai pemimpin gereja. Kalaupun ada, maka seringkali keberadaan para perempuan tersebut tidak lebih sebagai *token* atau simbol bahwa gereja pun telah aktif terlibat di dalam upaya peningkatan kesetaraan gender.³⁸

Oleh karena itulah rekonstruksi tentang keseimbangan pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan di dunia Israel kuno hendaknya menjadi dasar pijakan yang kuat untuk melawan hasil penafsiran Alkitab yang menganggap perempuan sebagai yang tidak mampu untuk berada pada puncak kepemimpinan. Hal ini berarti pula bahwa para perempuan Kristen tidak boleh takut untuk terlibat di dalam ranah politik; sebaliknya, mereka harus melihat keterlibatan mereka di dalam politik sebagai ajang untuk menyeimbangkan peran mereka dengan para laki-laki; dan sebagai akibatnya, keseimbangan tanggung jawab tersebut akan menaikkan status dan derajat mereka di Indonesia. Lebih lanjut, jika politik dimengerti sebagai kegiatan/hal menata hidup bangsa, maka tidak bisa tidak politik haruslah menjadi tanggung jawab setiap perempuan Kristen di Indonesia.³⁹

Hal menarik yang saya temukan dari pembahasan tentang rekonstruksi pembagian kerja di dunia Israel

kuno adalah bahwa pembagian kerja ini hanya terjadi secara seimbang ketika orientasi kehidupan berpusat pada rumah tangga/keluarga, yang harus dimengerti secara luas dalam arti bahwa kehadiran anggota keluarga yang satu beserta dengan peran aktifnya merupakan syarat utama bagi kelangsungan rumah tangga itu. Seorang laki-laki tidaklah boleh berpikir bahwa hanya dialah yang berhak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terutama yang dilakukan di luar rumah secara sendirian melainkan dengan lapang hati membiarkan kaum perempuan untuk mengambil peran aktif – bekerja bersama-sama dengannya di ranah publik guna mencapai hasil yang maksimal. Ketidakseimbangan terjadi ketika para lelaki mulai memonopoli tugas dan tanggung jawab dengan tujuan untuk menaikkan status dan pamor mereka sendiri seperti yang terjadi pada masa monarki Israel. Di sinilah, menurut hemat saya, bangsa Indonesia harus melihat negaranya sebagai “rumah bangsa” yang harus pula dikelola bersama oleh setiap anggota keluarganya. Hal ini dapat diawali dengan pembagian sistem pekerjaan yang seimbang di antara keduanya dan keseimbangan hanya mungkin terjadi ketika pihak perempuan diberi kesempatan untuk aktif secara total di dalam ranah publik. Untuk itu, sudah saatnya perempuan diperlakukan sebagai insan yang setara dengan laki-laki di dalam hal kepemimpinan. Sudah saatnya perempuan meraih kesempatan untuk menentukan sendirinya nasibnya yang ternyata jelas di dalam keputusan-keputusan legislatif yang berkenaan dengan masalah pendidikan, kebudayaan, pertanian, penegakan hukum, lingkungan, industri perdagangan, masalah sosial terutama gender dan lain sebagainya.

Di dalam Alkitab Perjanjian Baru sendiri terdapat banyak contoh yang menggambarkan tentang peran aktif perempuan di dalam kepemimpinan gereja baik sebagai pengkhotbah, nabiah, penginjil, maupun pengajar (1 Petrus 4:10-11, Kisah Para Rasul 6:2-4, Efesus 4:11-13). Para perempuan pemimpin yang termasuk di dalam kategori ini adalah Yunias (Roma 16:7), Nabiah Hanna (Lukas 2:36) dan guru Priskila (Kisah Para Rasul 18:26). Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta Salome ibu dari Yakobus dan Yohanes adalah para saksi pertama kebangkitan Yesus yang ditugaskan untuk mewartakan kabar baik tersebut. Ada pula keempat anak perempuan Filipus yang diberikan karunia untuk bernubuat (Kisah Para Rasul 21:8-9) dan banyak pula nabi perempuan di Korintus yang bernubuat dan berdoa (1 Korintus 11:5). Para

perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengawas gereja (setara dengan “kepala” pendeta). Rasul Yohanes mengalamatkan suratnya kepada seorang wanita pengawas dan para anggota yang bersekutu di rumahnya (2 Yohanes 1:1). Febe, seorang pelayan di Kengkrea, diutus oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ia dikatakan sebagai seorang yang memiliki kedudukan/posisi lebih tinggi dari jemaat yang lainnya, seorang pemimpin atas banyak orang dan bahkan atas Rasul Paulus sendiri (Roma 16:1-2). Selain itu, gereja di Filipi juga taat pada kepemimpinan rekan-rekan kerja Rasul Paulus yaitu Euodia dan Sintikhe (Filipi 4:2-3). Gereja Efesus pun dipimpin oleh Priska dan Akwila yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus (roma 16:3-5, 1 Korintus 16:19).⁴⁰ Contoh-contoh kepemimpinan para perempuan pada gereja mula-mula kiranya menjadi dasar pijakan yang kuat bagi kaum perempuan Kristen di Indonesia di masa kini untuk mengklaim peran dan tanggung jawab mereka untuk turut memimpin di ranah publik.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tagihan kuota sebanyak 30 persen yang diberikan kepada perempuan dalam politik terutama di lembaga perwakilan rakyat merupakan suatu langkah awal yang baik bagi perempuan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang setara di dalam rumah bangsanya. Namun, yang patut diingat adalah bahwa kehadiran para perempuan politisi di ranah politik haruslah bertujuan untuk membela hak-hak saudari-saudarinya sesama perempuan yang selama ini direbut, didiamkan dan diabaikan akibat pengaruh budaya patriarki yang kuat dan mendarah daging. Di sini para perempuan politisi ada untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh sesamanya kaum perempuan untuk menciptakan perubahan yang signifikan di dalam kehidupan berbangsanya. Karena jika tidak, maka sia-sialah perjuangannya dan ia akan dianggap sebagai “saudari yang hilang” karena membuang dan melupakan saudari-saudarinya sendiri yang melihatnya sebagai penolong, penguat dan pendamping yang dapat diandalkan. Pertanyaan penting yang sering kali terbersit di dalam pikiran setiap perempuan ketika mengamati keberadaan perempuan politisi di ranah publik adalah, “mengapa kehadiran para perempuan tersebut tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi perempuan di bangsa ini?” Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan hal tersebut, menurut hemat saya,

adalah seperti yang telah saya ungkapkan di bagian pendahuluan tulisan ini sehubungan dengan adanya kenyataan bahwa masih banyak perempuan politisi yang belum membekali dirinya dengan kesadaran gender, sehingga tanpa sadar ia hadir di kancah politik bukan sebagai sosok yang peduli terhadap permasalahan perempuan melainkan sebagai penganut bahkan penjaga setia budaya patriarkal yang telah meresap kuat di dalam keseluruhan eksistensi dirinya yang acapkali terpancar di dalam keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Di sinilah saya berpendapat bahwa sudah saatnya kita berpikir bahwa pendidikan politik yang sadar gender harus ditanamkan kepada perempuan dan tindakan ini harus diawali di dalam kelompok masyarakat terkecil yaitu keluarga inti. Kesadaran ini akan meresap kuat di dalam diri setiap anak baik perempuan maupun laki-laki sehingga pada akhirnya dapat berfungsi untuk melawan budaya patriarkal yang mengakar kuat di bumi nusantara ini. Sebagai perempuan Kristen yang sadar gender, adalah harapan saya bahwa kesadaran ini mampu ditularkan kepada semua orang karena saya percaya bahwa perubahan perspektif dapat menuntun kepada perubahan sikap. Kalau hal ini telah tercipta maka keadilan bagi semua orang di rumah bangsa ini terutama keadilan bagi kaum perempuan dapat dirasakan oleh semua orang. Sudah saatnya kehidupan yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi prioritas utama perjuangan bangsa ini.

Pembicaraan tentang peranan konkrit perempuan Kristen di ranah politik mengingatkan saya tentang sosok Aleta Baun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Aleta. Pejuang lingkungan asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur dan penerima penghargaan Goldman Environmental Prize Award 2013 ini berhasil mengumpulkan suara terbanyak dari semua calon legislative yang bertarung melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dengan demikian lolos menjadi anggota DPRD provinsi periode 2014-2019. Di dalam wawancaranya dengan sebuah surat kabar di NTT, Mama Aleta mengatakan bahwa kemenangannya adalah kemenangan kaum yang tidak bersuara di TTS yang selama ini menjadi korban ketamakan para penguasa asing maupun pemerintah Indonesia sendiri yang menghadirkan tambang di daerahnya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat lokal terutama perempuan dan anak-anak beserta lingkungan alam sekitar. Seperti yang dikatakannya, "Perjuangan kami ... [merupakan] bentuk perhatian

dan tanggungjawab kami terhadap alam yang menjadi sumber penghidupan kami sebagai masyarakat adat. Memang kepercayaan masyarakat ini menjadi kekuatan bagi saya dan perempuan lain untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan."⁴¹ Demikianlah keterlibatan sosok perempuan politisi Kristen seperti Mama Aleta hendaknya memberi citra positif kepada perjuangan perempuan Kristen lainnya yang terjun dalam dunia politik di Indonesia.

Penutup

Suatu hari saya mengikuti suatu kelas feminis bersama-sama dengan berbagai teman perempuan dan laki-laki dari berbagai belahan dunia. Ketika tiba saatnya bagi saya untuk berbagi cerita tentang keadaan perempuan di Indonesia yang masih harus "berjuang untuk menjadi matahari lagi"⁴² yang bersinar terang di tengah-tengah bangsanya sendiri, maka ada seorang teman dari Vancouver, Canada yang berkata, "Apa yang engkau ceritakan sama persis dengan perjuangan yang kami sebagai kaum perempuan di Amerika Utara ini harus hadapi dua ratus tahun yang lalu." Melihat keadaan teman-teman perempuan saya yang berasal dari konteks Barat dan menyaksikan betapa mereka telah sampai pada titik di mana kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi pergumulan kemanusiaan yang diperjuangkan baik oleh kaum perempuan dan laki-laki, maka saya berpikir, "Mungkin dua ratus tahun ke depan Indonesia baru akan bisa sampai ke tahap ini." Pikiran tentang dua ratus tahun, yang lama dan panjang, membuat saya sangat bersedih karena saya tidak akan ada lagi untuk melihat hari itu tiba di mana tidak ada lagi budak dan hamba, laki-laki dan perempuan, karena semuanya sama di mata Tuhan. Tetapi, pikiran tentang anak-anak saya dan anak-anak mereka dan anak-anak mereka lagi yang akan hidup dan menikmati buah manis dari hasil perjuangan kaum perempuan di era sekarang untuk mengklaim hak mereka untuk berpartisipasi di ruang publik membuat semangat saya untuk berjuang tidak redup melainkan telah sampai pada pemahaman yang utuh; bahwa kita berjuang untuk generasi yang akan datang. Para perempuan Israel di dalam Zaman Besi I telah membuktikan bahwa keseimbangan peran di antara laki-laki dan perempuan itu mungkin terjadi selama orang melihat sesamanya sebagai saudara-saudarinya sendiri di dalam rumah bangsa. Kita pun harus berani mengadopsi "tetangga" kita, baik itu perempuan dan laki-laki, untuk menjadi keluarga Indonesia sehingga ketika ada di antara kita yang

mengambil peran sebagai perempuan politisi, kita dengan segala keyakinan percaya bahwa dia duduk di “kursi” itu untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang rentan—dengan seluruh wajah saudari-saudari perempuannya di dalam pikirannya.

Daftar Pustaka

Alberto/Risky R., “Aleta Baun, Pejuang Lingkungan Lolos Sebagai Anggota Dewan.” Flobamora.net, Jumat 02 Mei 2014. [Online]. Tersedia pada: <http://www.flobamora.net/berita/1930/2014-05-02/aleta-baun-pejuang-lingkungan-lolos-sebagai-anggota-dewan.html>

Borowski, Oded. *Agriculture in Iron Age Israel*. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1987.

Christiani, Tabita Kartika. “Indonesian Feminist Church Leadership.” Dalam *In God’s Image*, Vol. 28, No. 3, Sept 2009.

Cristina, Garcia-Alfonso. *Resolviendo: Narratives of Survival in the Hebrew Bible and in Cuba Today*. New York: Peter Lang, 2010.

Ebeling, Jennie R. *Women’s Lives in Biblical Times*. London, New York: T & T Clark.

Gwat, Judith Na Bik. “The Shifting Gender Role of Women.” Dalam *Voices From The Third World*, Vol. XXIV No. 1, June 2001.

Hopkins, David C. *The Highlands of Canaan: Agricultural Life in the Early Iron Age*. Sheffield: Almond Press, 1985.

Hyun Kyun, Chung. *Struggle to Be the Sun Again: Introducing Asian Women’s Theology*. New York: Orbis Books, 1990.

Kolimon, Mery L. Y. “Tugas Gereja dalam Penguatan Masyarakat Sipil.” Dalam *Teologi, Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, diedit oleh John Campbell Nelson, Julius Majou, dan Zakaria J. Ngelow. Makasar: Yayasan Oase Intim, 2013.

Mantik, Maria Josephine. *Mengapa Perempuan Dipersulit Menjadi Pemimpin? Saat Perempuan Menjawab Panggilan dan Penguatan Tuhan*. Jakarta: Grasindo, 2012.

Manurung, Rosida Tiurma. “Ketidakberpihakan Jargon Politik terhadap Perempuan di Indonesia.” Dalam dalam *Gender and Politics*. Ed. Siti Hariti Sastriyani. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM dengan Sekolah Pascasarjana UGM & Penerbit Tiara Wacana, 2009.

Martyn, Elizabeth. *The Women’s Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. London and New York: Routledge Curzon, 2005.

Meyers, Carol L. “Procreation, Production, and Protection: Male-Female Balance in Early Israel.” *Journal of the American Academy of Religion* 51 (1983).

_____, “The Family in Early Israel,” dalam *Families in Ancient Israel*, diedit oleh Leo G. Perdue, Joseph Blenkinsopp, John J. Collins dan Carol Meyers (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1997).

Miller, Margaret. “‘Let Me Tell You About A Vineyard’: Isaiah’s Song of the Vineyard and the Green Revolution.” Dalam *Teologia: Jurnal Teologi Interdisipliner*, Vol. 1 – No. 1, Februari 2014.

Napsiah, “Nilai-nilai Profetik dan *Affirmative Action* di Partai Politik.” Dalam *Gender and Politics*, diedit oleh Siti Hariti Sastriyani. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM dengan

Sekolah Pascasarjana UGM & Penerbit Tiara Wacana, 2009.

Rahmawati, S.I.P., Dian Eka. “Partai Politik Islam dan Pemberdayaan Politik Perempuan (Rekrutmen Caleg Perempuan dari DPW PKS dan DPW PPP pada Pemilu 2004),” dalam *Women in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, diedit oleh Siti Hariti Sastriyani. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM dan Penerbit Tiara Wacana, 2008.

Roosa, John. *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto’s Coup D’etat in Indonesia*. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2006.

Sen, Krishna. “Women on the Move.” *Inside Indonesia* 58: Apr Jun 1999. [Online]. Tersedia pada: <http://www.insideindonesia.org/edition-58/women-on-the-move-2209690> [Diakses pada 8 Agustus, 2011].

Scholz, Susaanne. “Feminist Scholarship on the Old Testament.” Dalam *Oxford Bibliographies*. [Online]. Tersedia pada: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195393361/obo-9780195393361-0020.xml> [Diakses pada 16 Juni 2014].

Spencer, Aida Besançon. “A Cloud of Female Witnesses: Women Leaders in the New Testament.” Dalam *Priscilla Papers*, Vol. 23, No. 4, Autumn 2009.

Wieringa, S. “The Perfumed Nightmare.” Working Paper – Sub-Series on *Women’s History and Development* – No. 5, Feb 1985.

_____, “The Birth of the New Order State in Indonesia.” *Indiana University Press*, Vol. 15 No. 1 (Spring) 2003.

Catatan Belakang:

1 Napsiah, “Nilai-nilai Profetik dan *Affirmative Action* di Partai Politik,” dalam *Gender and Politics*, diedit oleh Siti Hariti Sastriyani (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM dengan Sekolah Pascasarjana UGM & Penerbit Tiara Wacana, 2009), 171-72.

2 Dian Eka Rahmawati, S.I.P., “Partai Politik Islam dan Pemberdayaan Politik Perempuan (Rekrutmen Caleg Perempuan dari DPW PKS dan DPW PPP pada Pemilu 2004),” dalam *Women in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, diedit oleh Siti Hariti Sastriyani (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM dan Penerbit Tiara Wacana, 2008), 458.

3 Rosida Tiurma Manurung, “Ketidakberpihakan Jargon Politik terhadap Perempuan di Indonesia,” dalam dalam *Gender and Politics*, diedit oleh Siti Hariti Sastriyani (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UGM dengan Sekolah Pascasarjana UGM & Penerbit Tiara Wacana, 2009), 184-88.

4 Rahmawati, “Partai Politik Islam,” 459.

5 Rahmawati, “Partai Politik Islam,” 459.

6 Rahmawati, “Partai Politik Islam,” 459.

7 Elizabeth Martyn, *The Women’s Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy* (London and New York: Routledge Curzon, 2005), 3.

8 Saskia Wieringa, “The Birth of the New Order State in Indonesia,” *Indiana University Press*, Vol. 15 No. 1 (Spring) 2003, 76-77. Lihat juga Saskia Wieringa, “The Perfumed Nightmare,” Working Paper – Sub-Series on *Women’s History and Development* – No. 5, Feb 1985, 22-23; John Roosa, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto’s Coup D’etat in Indonesia* (Madison, Wisconsin: The University

- of Wisconsin Press, 2006), 40, 103, dan 198-99.
- 9 Wieringa, "The Birth of the New Order State in Indonesia," 77-81.
 - 10 Krishna Sen, "Women on the Move," *Inside Indonesia* 58: Apr Jun 1999. [Online]. Tersedia pada: <http://www.insideindonesia.org/edition-58/women-on-the-move-2209690> [Diakses pada 8 Agustus, 2011].
 - 11 Sen, "Women on the Move."
 - 12 Mery L. Y. Kolimon, "Tugas Gereja dalam Penguatan Masyarakat Sipil," dalam *Teologi, Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, diedit oleh John Campbell Nelson, Julius Majou, dan Zakaria J. Ngelow (Makasar: Yayasan Oase Intim, 2013), 223.
 - 13 Kolimon, "Tugas Gereja dalam Penguatan Masyarakat Sipil," 223.
 - 14 Judith Na Bik Gwat, "The Shifting Gender Role of Women," dalam *Voices From The Third World*, Vol. XXIV No. 1, June 2001, 99-100.
 - 15 Gwat, "The Shifting Gender Role of Women," 100.
 - 16 Maria Josephine Mantik, *Mengapa Perempuan Dipersulit Menjadi Pemimpin? Saat Perempuan Menjawab Panggilan dan Pengutusan Tuhan* (Jakarta: Grasindo, 2012), 109-129. Untuk penjelasan konseptual tentang permasalahan kepemimpinan perempuan sehubungan dengan beberapa tema seperti marginalisasi, subordinasi dan stereotype dapat dilihat pada halaman 81-98.
 - 17 Susaanne Scholz, "Feminist Scholarship on the Old Testament," dalam *Oxford Bibliographies*. [Online]. Tersedia pada: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195393361/obo-9780195393361-0020.xml> [Diakses pada 16 Juni 2014].
 - 18 Carol L. Meyers, "Procreation, Production, and Protection: Male-Female Balance in Early Israel," dalam *Journal of the America Academy of Religion* 51 (1983), 570.
 - 19 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 570.
 - 20 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 573-74.
 - 21 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 574.
 - 22 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 577.
 - 23 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 577.
 - 24 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 577-78.
 - 25 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 579.
 - 26 Carol Meyers, "The Family in Early Israel," dalam *Families in Ancient Israel*, diedit oleh Leo G. Perdue, Joseph Blenkinsopp, John J. Collins dan Carol Meyers (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1997), 24. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan para petani Israel kuno pada Zaman Besi I terutama tentang tantangan-tantangan yang mereka hadapi dan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk bertahan hidup maka silahkan lihat David C. Hopkins, *The Highlands of Canaan: Agricultural Life in the Early Iron Age* (Sheffield: Almond Press, 1985); Oded Borowski, *Agriculture in Iron Age Israel* (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1987). Khusus untuk kehidupan para perempuan pada zaman biblia terutama peranan mereka di dalam pertanian dapat dilihat di dalam Jennie R. Ebeling, *Women's Lives in Biblical Times* (London, New York: T & T Clark).
 - 27 Meyers, "The Family in Early Israel," 25.
 - 28 Meyers, "The Family in Early Israel," 25-26.
 - 29 Meyers, "The Family in Early Israel," 26.
 - 30 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 582.
 - 31 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 585.
 - 32 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 585-86.
 - 33 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 586-87.
 - 34 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 586.
 - 35 Meyers, "Procreation, Production, and Protection," 587.
 - 36 Garcia-Alfonso Cristina, *Resolviendo: Narratives of Survival in the Hebrew Bible and in Cuba Today* (New York: Peter Lang, 2010), 37-38.
 - 37 Margaret Miller, "'Let Me Tell You About A Vineyard': Isaiah's Song of the Vineyard and the Green Revolution," dalam *Teologia: Jurnal Teologi Interdisipliner*, Vol. 1 – No. 1, Februari 2014, 121-47.
 - 38 Tabita Kartika Christiani, "Indonesian Feminist Church Leadership," dalam *In God's Image*, Vol. 28, No. 3, Sept 2009, 21.
 - 39 Kolimon, "Tugas Gereja dalam Penguatan Masyarakat Sipil," 223.
 - 40 Aída Besançon Spencer, "A Cloud of Female Witnesses: Women Leaders in the New Testament," dalam *Priscilla Papers*, Vol. 23, No. 4, Autumn 2009, 24.
 - 41 Alberto/Risky R, "Aleta Baun, Pejuang Lingkungan Lolos Sebagai Anggota Dewan," *Flobamora.net*, Jumat 02 Mei 2014. [Online]. Tersedia pada: <http://www.flobamora.net/berita/1930/2014-05-02/aleta-baun-pejuang-lingkungan-lolos-sebagai-anggota-dewan.html>
 - 42 Istilah "berjuang menjadi matahari lagi" adalah istilah yang dikemukakan oleh Chung Hyun Kyun di dalam bukunya *Struggle to Be the Sun Again: Introducing Asian Women's Theology* (New York: Orbis Books, 1990).

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik.....	iii-iv
Artikel / Articles	
• Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i>	175-182
<i>Rocky Gerung</i>	
• Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election</i> ...	183-189
<i>Gadis Arivia</i>	
• Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i>	191-196
<i>Husein Muhammad</i>	
• Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i>	197-205
<i>Nihayatul Wafiroh</i>	
• Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i>	207-219
<i>Ira D. Mangililo</i>	
• Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i>	221-226
<i>Indraswari</i>	
• Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i>	227-232
<i>Anita Dhewy</i>	
• Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i>	233-240
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i>	241-243
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	245-246
Profil / Profile	
• Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i>	247-251
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i>	253-256
<i>Anita Dhewy</i>	

